

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ardiantoro, J., & Faiz Maulana, M. (2025). Dasar-Dasar Metode Penelitian (N. Amanulloh, Ed.; 1st ed.). Diva Press.
- Armian, M. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Konstitusi Indonesia.
- Dwi, Rizkia, Nanda., Ferdiansyah, Hardi., 2023. Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Bandung: Widina Media Utama.
- Efendi, Jonaedi., Ibrahim, Johnny., 2022. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Friedman, L.M., (1975). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The legal System A Social Science Perspective). New York: Ressel Sage Foundation.
- Gomes, M., Madaeira Soares, I., & Arauijo, A. natalino C. R. A. (2025). Metode Penelitian Kualitatif (W. Yuliani, Ed.). CV. Angkasa Media Literasi.
- Handayani, R., 2023. Pengawasan Internal & Eksternal terhadap Platform Donasi Online. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khairandy, R., 2020. Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiawanto., 2022. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada
- Margono, S. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan. PT. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Moelong, L. (2004). Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.

Mulyawan, E., 2022. Hukum Perdata Digital: Perjanjian, Hibah, dan Transaksi Daring. Bandung: Nuansa Cendekia.

Prasetya, B. & Lestari, M., 2023. Crowdfunding dan Regulasi di Indonesia. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Rumadan, A. & Nainggolan, D.S., 2020. Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rumawi, A., Sari, D. & Maulida, R., 2024. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia di Era Digital. Malang: Inteligensia Media.

Salim, H.S., 2019. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, D., 2021. Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Semarang: Unnes Press.

Simatupang, D.P., 2020. Crowdfunding dan Aspek Hukumnya. Jakarta: Prenadamedia Group.

Siregar, A.P. & Firdaus, T., 2021. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Organisasi Nirlaba di Era Digital. Surabaya: Baberava Press.

Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Soekanto, S., 2022. Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. CV. Penerbit Qiara Media.

Subekti, R., 2020. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Intermasa.

Sudaryanto, A., 2021. Hukum Siber Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet.

Sugoyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.

Suyanto., 2022. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigres Press.

Widjaja, G., 2016. Hukum Perikatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Widodo, H., 2024. Hukum Siber Nasional dan Internasional: Aspek Administrasi, Perdata, dan Pidana dalam Pemanfaatan TI. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Artikel dalam Jurnal

Adelia, M.P. and Zahra, Y.K. (2025) 'Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia', 2, pp. 1-13.

Adelia, T.A. (2023) 'Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur Dan Penerima Donasi Melalui Platform Donation Based Crowdfunding (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia)', Privat Law, 11(1), pp. 153-160.

Adi, C.W. et al. (2022) 'Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Ditinjau Dari Uu Ite', Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), pp. 1529-1540.

Adolf, H. (2024). Prinsip itikad baik (good faith) dalam hukum kontrak. BANI Arbitration and Law Journal, 1(1).

Aghisna, N.D. & Astuti, V.F. (2025). Efektivitas penyampaian informasi digital dalam menangani hoax melalui Instagram @Diskominfo_Sukabumikota. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), pp.1031-1040.

Alberta, M. and Quintarti, L. (2024) 'Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Forms of

Legal Protection for Consumers from the Perspective of Law Number', 7(8), pp. 3161-3167.

Aqil, N.A., Putri, C.M. & Yunisa, D. (2022). Evaluation of cash on delivery system for improving legal certainty in the development of electronic transactions in Indonesia., 2(2).

Ariestu, I.P.D., Yudiawan, I.D.G.H. and Kusuma, P.R.A., 2023. Legal Protection for Foreign Legal Subjects in International Contracts: An International Private Law Perspective. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(2), pp.196-206.

Arliyanda Putra, F. & Nugroho, L.D. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan akun dalam transaksi elektronik melalui Traveloka. Journal Inicio Legis, 2(1), pp.86.

Azhari, F., Sumarno, S., Fauzi, A., Pratama, D.R., Musyafa, M.A., Nawawi, M.R. & Ghaffar, N.S.A. (2024). Penerapan manajemen sekuriti dalam meningkatkan keamanan pengguna pada transaksi e-wallet., 2(2).

Badri, S., Handayani, P. & Rizki, T.A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. Jurnal USM Law Review, 7(2).

Darminingsih, P.M.R., Dantes, K.F. and Hadi, I.G.A.A., 2026. Perlindungan Konsumen terhadap Produk Skincare Overclaim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berajah Journal, 5(12), pp.981-985.

Dwi Imaniawan, F.F. (2020). Sistem informasi penyaluran donasi berbasis web. Indonesian Journal on Software Engineering, 6(1), pp.44-55.

Edyson, D. et al. (2024) 'Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual', 8(1), pp. 930-939.

Evantori, E. et al. (2023) 'Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (

E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik', 7(2), pp. 2109-2120.

Fandi, F. and Imaniawan, D. (2020) 'Sistem Informasi Penyaluran Donasi Berbasis Web', 6(1), pp. 44-55.

Farudin, M. et al. (2025) 'Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi'.

Fauzi, A. & Koto, I. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Yuridis*, 9(1), pp.13-26.

Gunawan, K.P., Ardhya, S.N. and Hadi, I.G.A.A., 2024. Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.

Halawa, I. and Ritonga, H.J. (2025) 'Manajemen pelayanan donasi online di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 22(1), pp. 1-16.

Hartanto, R. (2020). Hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. *Jurnal IUS TUM*, 27(1).

Hasanudin, M.N., Muzakka, M.R., Kholid, M.A., Munawir, A., Nurrozikin, M.T. & Ariyah, S.H.A. (2025). Pengantar hukum perikatan dan asas-asas hukum perikatan. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1).

Ramdani, V.O., Dantes, K.F. & Hadi, I.G.A.A. (2026). Tinjauan yuridis penyimpanan minuta akta dalam bentuk arsip elektronik. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), pp.2260–2270
Hutari Dwi Putri, F. & Devi, N.S. (2022). Analisa penyalahgunaan social crowdfunding. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(5).

Idris, M. (2025) 'Indikator Transparansi Kampanye Donasi', 9(2), pp. 3129-3136.

Iwanti, N.A.M. & Taun (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2).

Juanda, E. (2021). Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2).

Junaidi, M., Sukarna, K. & Sadono, B. (2020). Pemahaman tindak pidana transaksi elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Budimas*, 2(2).

Kesuma, A.A.N.D.H., Budiarta, I.N.P. & Wesna, P.A.S. (2021). Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi konsumen teknologi finansial dalam transaksi elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), pp.411-416.

Khoir, M. (2025). Analisis hukum atas sengketa donasi yayasan Novi dan Agus: isu transparansi, penyalahgunaan dana, dan peran mediasi dalam penyelesaiannya. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(2), pp.50-67.

Laela, N.B., Solihah, S.N., Khalimy, A. & Pamungcak, A.W. (2025). Benturan antara penyalahgunaan donasi dan pencemaran nama baik (tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi). *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).

Made, N. et al. (2023) 'Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat', 4(1), pp. 13-19.

Maharani, R. et al. (2024) 'Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital', 7(1), pp. 333-347.

Maria, F. et al. (2023) 'Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan', 7(2), pp. 2176-2184.

Morlin Iwanti, N.A. (2022). Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum

wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Muklis (2023). Analisis ganti kerugian berdasarkan perspektif hukum perdata. *Iuris*, 4(1), pp.6-10.

Mulandari, S., Fitriani, Y., Utami, S. & Junadi, B. (2021). Sistem informasi donasi online berbasis website. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), pp.232-251.

Nurchahyo, N. (2021) 'Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia', (24), pp. 69-78.

Pasaribu, P. & Zulfa, E.A. (2021). Akibat hukum identitas palsu dalam akta perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), pp.535.

Pelawi, M., Dantes, K.F. and Hadi, I.G.A.A., 2023. *Pendekatan Hukum Perdata Internasional: Mengoptimalkan Choice of Law dalam Resolusi Sengketa*. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), pp.95-109.

Priyono, E.A. (2022). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak).

Rusdiyanti, S., Hutagalung, B., Afandi, R., Firmansyah, S.M. & Radianto, D.O. (2023). Pentingnya literasi informasi dalam menghadapi tantangan informasi palsu (hoaks). *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(2), pp.395-400.

Safira Hasna and Irwansyah (2019) 'Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi', *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(2), pp. 144-156.

Sari, K., Firdaus, S.H. and Putra, S. (2023) 'Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online', *Sibatik Journal*, 2(7), pp. 1951-1964.

Sri, U.S. (2022) 'JA: Jurnal Al-Wasath 3 No.2: 105-112', 6160(2), pp. 105-11.

Sulaiman, A., Rustam, M.H. & Kurniawan, R. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi donatur dalam donation based crowdfunding di Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 4(4), pp.40-65.

Urbanisasi & Indra, J.A. (2025). Pertanggungjawaban hukum influencer atas penggalangan dana publik: studi kasus penyelewengan donasi selebgram. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), pp.11146-11152.

Widiatun, S. and Kn, M. (2024) 'Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola', pp. 1272-1285.

Wijanarko, D.S. & Pribadi, S. (2022). Perlindungan hukum preventif terhadap merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), pp.192-201.

Yasmianti, N.L.W., Yudiawan, I.D.G.H., Devi, P.F.S., Ferreira, J.C.B. & Savitri, N.N.A.H. (2024). Legal implications of Indonesia's Kominfo data leak between government responsibility and consumer rights protection. *Proceedings of the International Conference on Law, Society and Social Environment (ICLSSE 2024)*, Singaraja, 17 October.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6880).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.

